

**ALIANSI MILITER KOREA SELATAN DENGAN
AMERIKA SERIKAT DALAM MELAKUKAN
STRATEGIC ALLIANCE UNTUK MENJAGA
STABILITAS KEAMANAN SEMENANJUNG KOREA
TAHUN 2015-2016**

SKRIPSI



**Disusun oleh:
Fifi Rizki Amalia
20160510160**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2020

BAB III

KEPUTUSAN KOREA SELATAN MELAKUKAN *STRATEGIC ALLIANCE* DENGAN AMERIKA SERIKAT

Keputusan yang di buat oleh Korea Selatan untuk melakukan pertahanan baru melalui *Strategic Alliance* dengan Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan militer sebagai bentuk upaya menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah sekutu di bawah Perjanjian *Mutual Defense* 1953. Berdasarkan kesepakatan tersebut, personil militer A.S telah mempertahankan kehadirannya di Semenanjung Korea dan berkomitmen untuk membantu Korea Selatan mempertahankan diri, terutama melawan agresi apapun dari Korea Utara. Amerika Serikat mempertahankan sekitar 28.500 tentara di ROK. Komandan A.S di Korea Selatan menyatakan bahwa peran mereka di masa depan untuk pertahanan Korea Selatan akan sangat maksimal, terutama angkatan udara dan angkatan laut. Peningkatan kemampuan militer di Semenanjung Korea sangat dibutuhkan karena adanya ancaman dari Korea Utara melebihi kemampuan Korea Utara saat ini tidak hanya memiliki keunggulan dalam jumlah personil militer namun juga kemampuan untuk menghasilkan senjata nuklir.

Dalam bab ini, penulis akan mencoba untuk menjelaskan terkait keputusan yang dibuat oleh Republic of Korea and Amerika Serikat (ROK-AS) yang mencoba untuk lebih fokus dalam mempertahankan wilayah kawasan Semenanjung Korea dari serangan nuklir Korea Utara.

A. Bentuk-bentuk *Strategic Alliance*

Situasi yang memanas di Semenanjung Korea, membuat Korea Selatan membentuk suatu kesepakatan dan rencana untuk menjaga keamanan di kawasan. Korea selatan dan Amerika Serikat mengatur hal tersebut dengan membuka jalur komunikasi dengan Korea Utara. Saat ini, aliansi ROK-AS berfungsi sebagai landasan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Ancaman-ancaman lama Korea Utara belum hilang. Korea Selatan dan Amerikat harus mencari bentuk baru sistem aliansi dan kerjasama militer yang sesuai untuk aliansi strategis. Kedua negara perlu menjalani proses meminimalkan kesenjangan dalam persepsi mereka dengan menopang keamanan mereka, memetakan berbagai rencana yang disesuaikan untuk berbagai jenis tantangan, dan pengaturan ruang lingkup dan tingkat kerja sama dan pembagian misi. Dalam memahami dan bertindak dan berpikir sama, ROK-AS harus bertujuan mengembangkan aliansi mereka menjadi sebuah hubungan dimana mafaat dan tanggung jawab dibagikan.

1. Transfer Operational OPCON

Amerika Serikat telah sepakat untuk menyerahkan perintah tentara Korea ke Korea Selatan, namun kedua pihak telah menunda pengalihan ini selama beberapa tahun. Di bawah pengaturan komando saat ini, yang merupakan warisan kepemimpinan A.S. pada koalisi *United Nations* (UN) pada Perang Korea tahun 1950-1953, tentara Korea Selatan akan berada di bawah komando pasukan A.S. jika terjadi perang di semenanjung tersebut.

Pada saat itu, Presiden Rhee Syang-man mendelegasikan pelaksanaan *Operational Control* (OPCON) kepada komandan *United Nations Command* (UNC), Jenderal MacArthur. Presiden Rhee mengirim surat pada 14 Juli 1950 dan menugaskan otoritas komando atas semua pasukan darat, laut, dan udara Republik Korea kepada komandan. Selama periode kelanjutan dari keadaan permusuhan pada saat itu. Surat itu bisa menjadi tanggapannya terhadap permintaan PBB. Bagaimanapun, surat yang berikan itu menyatakan bahwa semua pasukan di Semenanjung Korea akan berda di bawah kendali seorang komandan tunggal, Jenderal MacArthur.

Unit luar biasa dari OPCON itu berkembang selama Perang Vietnam. Pasukan ROK yang dikirim ke Vietnam dari tahun 1965 hingga 1973 dikontrol secara eksklusif oleh komandan militer ROK dan dioperasikan bekerja sama dengan pasukan dari Amerika Serikat. Sebagai hasil dari pengalaman ini, rakyat Korea menyadari bahwa OPCON dapat diubah. Mereka juga mulai menyadari kerugian UNC OPCON atas pasukan mereka, terutama pada Januari 1968 ketika UNC menanggapi secara aktif penculikan kapal intelijen AS. (Lee, 2013)

Pada akhir 1980-an, transfer OPCON mulai membentuk bagian dari agenda nasionalistik di Korea Selatan. Orang-orang Korea Selatan telah mulai mengakui pentingnya kemandirian berkat pertumbuhan signifikan kekuatan nasional ROK sebagai hasil dari perkembangan ekonomi yang pesat. Amerika Serikat juga memikirkan pengurangan tanggung jawab dan ukuran pasukannya di Semenanjung Korea sebagaimana diwakili oleh Senator Sam Nunn dan inisiatif Senator John Warner selama periode itu. Sebagai hasil dari perkembangan ini, pada tahun 1994,

ROK dan Amerika Serikat akhirnya setuju untuk mentransfer OPCON ke militer ROK.

Satu peringatan penting mengenai pengalihan ini adalah kesepakatan antara ROK dan Amerika Serikat untuk menyerahkan beberapa otoritas penting gencatan senjata OPCON kepada Komandan *Combined Forces Command* (CFC). Untuk menjamin transisi yang mulus dari kondisi gencatan senjata ke situasi perang, mereka meminta Komandan CFC untuk terus menggunakan wewenang untuk enam bidang termasuk manajemen krisis gabungan untuk pencegahan dan pemeliharaan perjanjian gencatan senjata, mengembangkan Rencana Operasional (OPLAN), perencanaan dan pelaksanaan latihan gabungan, manajemen intelijen gabungan, dan interoperabilitas C4I (*Command, Control, Communication, Computer and Intelligence*) dengan judul "Combined Delegated authority (CODA)". Akibatnya, kesiapan tempur gabungan antara ROK dan Amerika Serikat di Semenanjung Korea tetap sama seperti sebelumnya meskipun pengembalian kontrol operasional sebagian.

Kembalinya OPCON pada masa perang menjadi isu sentral di awal pemerintahan Roh Moo-hyun pada tahun 2003. Pemerintahan Roh bersikeras pada perebutan kembali otoritas yang cepat atas nama pemulihan penuh kedaulatan nasional. Namun demikian, administrasi berhasil membawa Amerika Serikat ke sebuah perjanjian dan sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan pada bulan Februari 2007 bahwa otoritas OPCON akan dikembalikan pada tanggal 17 April 2012.

Pada saat itu, muncul kekhawatiran di ROK dan komunitas militer AS, terutama mengenai kesatuan komando dalam hal perang. Dimana pengeluaran pertahanan Korea Selatan yang tidak merata dan hambatan operasional kelembagaan dan ROK tidak cukup waktu untuk meningkatkan komando, kontrol, komunikasi, komputer, dan intelijen (C4I) (Ahn, 2002).

Kemudian transfer OPCON ditunda dari bulan April 2012 hingga Desember 2015 memberikan waktu tambahan untuk mempertimbangkan masalah OPCON dalam konteks visi bersama kedua presiden 2009 tentang masa depan AS-ROK persekutuan. Visi bersama dan hubungan baik berdasarkan persahabatan yang langgeng dan nilai-nilai bersama memberikan dasar yang tepat untuk memandu penerapan bentuk-bentuk baru kerja sama kelembagaan yang dirancang untuk memastikan bahwa aliansi tersebut berkelanjutan.

Pada tingkat politik tertinggi di kedua negara, para pemimpin memandang langkah ini melalui prisma kedaulatan nasional dan pembagian aliansi yang pada waktu itu mereka tidak secara serius mempertimbangkan masalah kesiapan militer atau waktu persiapan dan dampaknya terhadap pencegahan di kala ancaman dari wilayah Semenanjung Korea. Presiden Lee Myung-bak secara resmi meminta penundaan perpindahan OPCON (*Operation Control Command Control and Information System*) lalu pada musim gugur tahun 2010, *Strategic Alliance 2015* disetujui dan mulai perencanaannya sebagai jalan transisi baru. (Hwang, 2013)

Peta jalan untuk transformasi aliansi ini diuraikan dalam rencana "Aliansi Strategis 2015" yang baru, hasil dari Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan AS-ROK. Rencana tersebut tidak hanya mencakup transisi OPCON/OPCON CCIS, *Land Partnership Program*, dan *Yongsan Relocation Plan* bersama dengan kemampuan ROK yang menyertainya untuk memimpin perang dan juga konsolidasi pangkalan AS menjadi dua hub, normalisasi tur, dan manajemen pasukan (*Exercise and Certification Plans*) AS di Korea dalam persyaratan misi yang lebih luas di seluruh dunia.

Rencana transisi OPCON membayangkan Korea Selatan sebagai yang memimpin pertahanan melawan Korea Utara dan juga persyaratan rencana operasional lainnya. Kepala Staf Gabungan ROK (JCS) sebagai komando yang didukung dalam perang, sementara Korea Command (KORCOM) akan menjadi komando pendukung, dan Komando Pasukan Gabungan AS-ROK saat ini (CFC) akan menjadi atasan dari komando yang lainnya. Ketika transisi diperiksa ulang, penting untuk memastikan bahwa kapabilitas gabungan dan sinergi tetap dalam struktur baru. Pertunjukan komitmen kepada aliansi juga harus terlihat dan konsisten selama transisi untuk mengirim pesan pencegahan ke Korea Utara. Rencana tersebut meminta seluruh koordinasi antara komando nasional dan KORCOM untuk memberikan bantuan dan menjembatani akses untuk memperoleh bantuan pertahanan sampai Korea Selatan sepenuhnya berkembang dan menguasai wilayah-wilayah berbahaya seperti Semenanjung Korea. Prinsip utama perang adalah kesatuan komando, yang telah berhasil diterapkan pada banyak aliansi dan koalisi di masa lalu sebagai upaya untuk mendamaikan perbedaan dalam geografi, fungsi, layanan, dan koalisi (Park H. R., 2010).

Dengan transisi komando ke KORCOM hal ini merupakan sebuah langkah menuju kemajuan yang positif dalam menyeimbangkan tidak hanya sumber daya yang tersedia, namun juga visibilitas strategis. KORCOM akan membiarkan Korea Selatan menjadi lebih terlihat dan memiliki peran lebih besar dalam pertahanan mereka sendiri. KORCOM memungkinkan mereka untuk menggambarkan legitimasi suatu negara, kawasan, dan tiap golongan secara global. Struktur baru ini akan meningkatkan pertahanan Korea Selatan, sekaligus mengurangi jejak Amerika yang konstan pada agenda masa depan setelah tahun 2015. (ROK-JCS, 2012). Dari informasi yang di dapat dari Colonel Michael

Ferris, mantan *8th Army Liaison Officer to First and Third ROK Armies* memberitahukan bahwa Korea Selatan siap untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka dapat mempertahankan tanah air mereka dan berkomitmen untuk menjalankan transisi ini dengan sempurna. (Willard, 2012)

US-ROK CFC menyediakan kesatuan komando dan kesederhanaan, yang berfungsi sebagai markas peperangan selama operasi gabungan. Rencana transisi OPCON harus memasukkan prinsip-prinsip penting ini ke dalam struktur komando dan kontrol yang baru sambil memastikan kemampuan gabungan, termasuk gabungan sistem komunikasi dan koordinasi. Selain itu, kemampuan gabungan ini tidak boleh dibagi menjadi kemampuan AS dan ROK yang terpisah tetapi harus dijumpai secara mulus untuk menciptakan sinergi. Misalnya, efektivitas tambahan, interoperabilitas, dan hubungan yang dibangun dari co-location dan praktik sehari-hari umum yang ada di bawah CFC tidak boleh hilang.

Korea Selatan membutuhkan komando komponen darat tunggal yang dapat berkoordinasi erat dengan komponen udara dan laut. Komponen-komponen ini akan dilaporkan ke satu perintah perang yaitu ROK JCS. Penting untuk memastikan bahwa Komandan Pasukan Gabungan tidak diberi tugas-tugas lain selain perang. Komponen ROK juga harus dapat berkoordinasi erat dengan mitra Amerika Serikat.

Dalam manajemen krisis, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara Kementerian Pertahanan dan JCS dan di antara layanan-layanan tersebut. Kesatuan di antara Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Korps Marinir dalam semua tahap proses militer sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan eksekusi. AS mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit selama Operasi EAGLE CLAW pada 1980, yang gagal menyelamatkan sandera AS di Iran, sebagian besar karena kurangnya integrasi dan

koordinasi di antara layanan. Kesatuan akan meningkatkan kemampuan militer Korea. (O, 2010)

Salah satu aspek dari Aliansi Strategis 2015 adalah penataan kembali dan relokasi Pasukan AS Korea. ROK-AS menata kembali posturnya dan menjadi lebih efisien melalui konsolidasi kehadiran pasukan AS di sekitar dua hub, Daegu dan Pangkalan Udara Osan-Garrison Humphreys, selatan Seoul. Namun rencana lain, Rencana Relokasi Yongsan 2004, secara khusus membahas tentang relokasi pasukan AS dari Yongsan Garnisun Angkatan Darat di Seoul sebagian besar ke Garrison Humphreys di Pyeongtaek. Awalnya, markas CFC akan pindah dari Yongsan, tetapi dengan transisi OPCON, markas CFC tidak jadi di pindah atas dasar CFC merupakan simbol aliansi dan jika penempatan CFC di pindah akan ada potensi pemisahan dari keluarga mereka. Dengan hal itu mereka menetapkan komando KORCOM, elemen AS, yang akan pindah. hal ini diatur dalam Normalisasi tur yang merupakan komponen lain dari Aliansi Strategis 2015. (O, 2010)

Saat ini, tur adalah satu hingga dua tahun tergantung pada apakah anggota militer disertai oleh keluarga. Normalisasi tur menambah satu tahun tambahan dan menambah jumlah keluarga yang dapat dibawa ke Korea. Ini menyiratkan pengurangan pergantian personel, yang meminimalkan hilangnya pengetahuan dan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari kembali proses militer, dan juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan rekan-rekan ROK sambil mengurangi tekanan pada keluarga. Tur yang lebih lama menunjukkan komitmen AS yang lebih besar melalui kehadiran jangka panjang, yang membantu mencegah agresi. Namun, dengan tur yang dinormalisasi, militer mungkin ditugaskan untuk menyingkir dari Semenanjung Korea, yang dapat meniadakan beberapa manfaat dari inisiatif semacam itu. Jadi, Strategic Alliance 2015 memasukkan isu-isu transformasi utama untuk mempromosikan transisi yang sukses ke aliansi militer baru

yang diarahkan untuk abad ke-21. (Hwang, Colonel Young Sul, 2013)

2. Penempatan pasukan Amerika Serikat

Amerika Serikat dan Korea Selatan berkomitmen untuk mengurangi jumlah personil USFK dengan total 12.500 personil dalam tiga tahapan hingga tahun 2008. Pengurangan ini dilakukan dengan mengurangi jumlah personil dari 37.500 personil pada 2003 menjadi 32.500 personil di 2004 dan akhirnya mencapai angka 25.000 di 2008. Namun pada tahun 2008, kedua negara setuju untuk mempertahankan jumlah USFK pada angka 28.500 dan sampai kepada tahun 2010-2013 penempatan pasukan tetap dalam jumlah 28.500, Namun ada penambahan jumlah pasukan di tahun 2013-2014 sebesar 800 jumlah pasukan dan hampir mencapai 35.000 pasukan pada tahun 2016. (Desjardins, 2017)

Korea Selatan dan Amerika Serikat juga menyetujui untuk dilakukannya relokasi markas USFK. Relokasi ini dapat menantang pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk mempertahankan kekuatan dan efektivitas organisasi komando. Terdapat dua tujuan dalam relokasi ini yaitu memindahkan Yongsan base di Seoul ke U.S Army Garrison (USAG) Humphreys yang berlokasi di kota Pyeongtaek dan penarikan 10.000 personil dari DMZ ke Han River. Kawasan Seoul yang semakin padat dengan adanya urbanisasi menjadi alasan pemindahan lokasi militer Amerika Serikat.

Rencana penataan kembali seluruh pasukan A.S. dari basis dekat perbatasan zona demiliterisasi (DMZ) dengan Korea Utara ke basis lebih jauh ke selatan berlanjut setelah penundaan awal, namun tantangan dengan postur kekuatan USFK tetap ada. Tingkat pasukan tetap sekitar 28.500. Rencana penataan kembali mencerminkan pergeseran menuju peran pendukung untuk USFK dan keinginan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari lokasi basis Yongsan

AS yang besar di pusat kota Seoul. (Ji-hye, City Protests US Troop Presence, 2015)

3. Pertahanan Rudal Balistik dan Potensi Penempatan *Terminal High Area Defense* (THAAD)

Ancaman rudal balistik Korea Utara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memeriksa bagaimana meningkatkan kemampuan BMD (*Balistic Missile Defense*) mereka untuk mempertahankan pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang akan di tempatkan di Semenanjung Korea. Amerika Serikat telah mendesak Korea Selatan untuk mengembangkan atau memperoleh kemampuan BMD yang canggih dan mengintegrasikannya dengan siste BMD Amerika Serikat dan sekutu di wilayah ini. Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat menyatakan bahwa system pertahanan rudal regional akan lebih efektif melawan peluncuran rudal Korea Utara dan akan berbagi beban dengan pertahanan antar sekutu. (RELEASE, 2017)

Korea Selatan telah menempatkan penekanan berat pada pengembangan system pertahanan berteknologi tinggi yang asli. Korea Selatan sedang mengembangkan system pertahanan rudal sendiri yang disebut Korea Air and Missile Defense (KAMD) termasuk system Aegis dan Patriot, dan dirancang untuk melindungi Korea Selatan dari rudal yang terbang di ketinggian dan jarak yang berbeda dengan mendeteksi, melacak, dan mencegah rudal yang masuk . THAAD yang saat ini berada di bawah system pertahanan rudal AS juga di jalanankan di Korea Selatan.

Aegis merupakan sistem pertahanan rudal berbasis laut. Kemudian THAAD adalah senjata pertahanan daerah yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan daerah yang luas terhadap rudal yang terbang di ketinggian yang tinggi. THAAD menggunakan pencegat hit-to-kill satu tahap

untuk menghancurkan targer rudal balistik yang masuk. System Patriot adalah system pertahanan udara dan rudal utama angkatan darat AS. Patriot dikenal dengan senjata pertahanan yang tajam yang dimana dapat menecat rudal yang diarahkan ke area yang lebih kecil seperti pangkalan udara. THAAD dan Aegis SM-3 interceptor beroperasi pada ketinggian diatas 50 kilometer dan jangkauan intersepsi efektif system Patriot adalah pada ketinggian sekitar 25 hingga 30 kilometer dengan varian Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptor memperluas terbang ke ketinggian sekitar 40 kilometer. (Ji-hye, US Brings PAC-3 Unit to Korea, 2016)

Ada empat komponen utama untuk THAAD: peluncur, pencegat, radar, dan kontrol tembakan. Peluncur dipasang pada truk untuk mobilitas dan daya simpan. Ada delapan pencegat per peluncur. Konfigurasi Angkatan Darat saat ini dari baterai THAAD termasuk enam peluncur dan 48 pencegat, meskipun laporan tertentu menunjukkan bahwa ini dapat ditingkatkan hingga sembilan peluncur dan 72 pencegat (Kazianis, 2014). THAAD dicegat untuk pertama kalinya target rudal balistik jarak menengah dalam sebuah tes pada 11 Juli 2017. THAAD awalnya menerjunkan pada bulan April 2012 dengan dua baterai di Fort Bliss, Texas. Pada akhir 2015, lima baterai THAAD telah diaktifkan. Empat siap secara operasional untuk ditempatkan dan yang kelima dijadwalkan untuk menyelesaikan pelatihan pada tahun 2016 (defense, 2015).

4. Pemberian sanksi terhadap Korea Utara

Presiden Amerika Serikat dan Korea Selatan sepakat untuk bersama sama mengambil langkah yang signifikan, termasuk sanksi baru untuk menunjukan kepada Korea Utara bahwa ada konsekuensi terhadap setiap tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya. ROK-US akan segera

mengadakan rapat darurat tertutup dengan Dewan Keamanan PBB (DK PBB), dimana DK PBB sangat mengutuk uji coba tersebut dan mengatakan bahwa akan mengambil langkah yang signifikan untuk merespon uji coba tersebut. Pernyataan ini mengatakan tindakan non-militer, tindakan seperti sanksi yang akan diambil berdasarkan Pasal 41 piagam PBB (House, 2016).

Pada tahun 2016, Amerika Serikat menandatangani perintah untuk menjatuhkan sanksi tambahan pada Korea Utara yaitu “North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016” atas program nuklirnya. Sanksi tersebut meliputi pembekuan aset pemerintahan Korea Utara di AS dan juga Non-Amerika. Pembekuan tersebut berupa larangan ekspor dan investasi. DK PBB juga menjatuhkan sanksi termasuk perintah untuk menginspeksi seluruh kargo yang meninggalkan dan masuk Korea Utara baik melalui darat, laut maupun udara. Korea Utara juga dilarang menjual atau membeli senjata dalam jumlah kecil atau besar, kemudian setiap negara dilarang menjual senjata ke Pyongyang. Selain itu, setiap diplomat yang terlibat dalam aktivitas terlarang harus menjalani pengusiran dari negara. (nation, 2017).

Adapun hasil dari penetapan sanksi baru bagi Korea Utara, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2270. Resolusi tersebut mendapat dukungan para anggota di PBB terutama Amerika Serikat yang menyatakan persetujuannya atas dikeluarkannya resolusi tersebut. Department Keuangan AS juga mengumumkan bahwa telah menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Korea Utara Kim Jong Un, yakni pembekuan aset-aset kim di AS dan melarang warga AS berbisnis dengannya. Selain Kim, ada 10 petinggi Korea Utara lainnya yang menjatuhi sanksi serupa dan kepada delapan Organisasi Korea Utara kerana terlibat dalam program nuklir dan rudal Pyongyang.

Tidak hanya AS, Korea Selatan mengumumkan dihentikannya kegiatan di kompleks industri Kaesong di Seoul. Kawasan Industri Kaesong di buka pada 2004 sebagai kerjasama lintas perbatasan rekonsiliasi. Sekitar 124 perusahaan Korea Selatan beroperasi di Kaesong dan mempekerjakan lebih dari 53 ribu pekerja Korea Utara. Korea Selatan menghentikan industri yang dioperasikannya bersama Korea Utara sebagai tanggapan terhadap uji coba nuklir dan peluncuran roket Korea Utara.

Menteri Unifikasi Hong Yong-pyo mengatakan, mengambil tindakan itu untuk mencegah Pyongyang memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari kompleks industri Kaesong untuk mendanai program-program pembuatan senjata nuklir dan misil balistiknya. Pada saat Korea Utara meluncurkan satelitnya ke orbit, Korea Selatan dan sekutu-sekutunya percaya peluncuran saat itu adalah ujian rahasia teknologi rudal yang suatu hari dapat digunakan untuk menargetkan daratan AS yang berada di Korea Selatan dengan hulu ledak nuklir. Hong juga mengatakan Korea Utara telah diberitahu atas keputusan Korea Selatan untuk menutup kawasan industri Kaesong yang terletak sekitar 10 kilometer dari seberang perbatasan di Korea Utara. (Voa, 2016).

Penutupan ini dianggap sebagai salah satu opsi non-militer paling kuat yang terbuka untuk pemerintahan Korea Selatan. Sebenarnya kawasan ini telah menjadi sumber keuangan yang sangat dibutuhkan Korea Utara yang miskin. Korea Utara telah memperoleh 616 miliar won dalam bentuk tunai dari Kaesong yang bergantung pada investasi dan teknologi Korea Selatan dan puluhan ribu pekerja terampil Korea Utara. Dalam konferensi pers AS sebulan setelah uji coba nuklir, mengatakan bahwa “Pekerja Korea Utara akan kehilangan pekerjaan mereka”. Korea Selatan juga tegas menanggapi provokasi Korea Utara dan secara konsisten

proyek pertukaran dan kerjasama politik dan non politik dengan memisahkannya dari Korea Utara. Kemudian membekukan semua aset di kawasan, memutuskan dua jalur militer antar Korea, dan memulihkan kontrol militer atas zona KIC. (mccurry, 2016)

Kemudian Amerika dan Korea selatan mengeluarkan perintah eksekutif yaitu menegaskan kembali larangan atas impor barang, jasa, dan teknologi dari Korea Utara melalui program nuklir Korea Utara membuat kedua negara merasa harus menerapkan cara diplomasi berbeda terhadap Pyongyang. Sikap dan perilaku Korea Utara terhadap ROK-AS yang berubah ubah dan harus menerapkan strategy dan kebijakan yang dapat menyesuaikan perilaku Korea Utara.

Penetapan suara DK PBB resolusi 2371 berdasarkan Pasal 41, Bab VII Piagam PBB, dewan 15 negara memutuskan bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea tidak akan memasok, menjual atau mentransfer batubara, besi, bijih besi, makanan laut, timah dan bijih timah ke negara lain. Kemudian Pyongyang tidak akan menggunakan senjata kimia dan mendesaknya untuk menyetujui konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan senjata kimia dan penghancurnya. (nation, 2017)

Dengan dikeluarkannya sanksi untuk Korea Utara yang terus mengancam perdamaian kawasan Semenanjung Korea dan internasional merupakan sanksi terberat yang pernah ada karena mengambil sepertiga pendapatan ekspor dan mata uangnya. Dan pihak Amerika Serikat akan mengambil tindakan defensive untuk melindungi dirinya dan sekutunya termasuk melalui pelatihan militer bersama.

B. Kebijakan Politik Luar Negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara

Hubungan antar Korea pasca perang Korea pada tahun 1953 selalu mengalami pasang surut. Perbedaan mendasar dalam kebijakan luar negeri masing masing negara tersebut yang menjadikan selalu bertentangan. Kebijakan luar negeri yang dibuat ialah untuk perwujudan dari suatu kepentingan negara yang mana menjadi kebutuhan dalam negerinya, misalnya kebutuhan politik, keamanan, sosial budaya dan ekonomi. Pemerintahan Korea Selatan di amasa tahun 2013-2016 membuat kebijakan baru setiap masa kepemimpinan yang dimana mewujudkan wilayah Semenanjung Korea yang bebas akan ancaman nuklir Korea Utara.

Keputusan Presiden Korea Selatan berupaya membangun dialog dengan Korea Utara dan sekutu, berharap adanya hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Korea Utara. Aksi provokasi dari Korea utara bukanlah merupakan isu baru, melainkan sudah berlangsung sejak berhentinya perang Korea dengan perjanjian gencatan senjata, bukan kesepakatan damai. Oleh karena itu, secara hukum Korea Selatan dan Korea Utara hingga saat ini masih dalam kondisi perang, sehingga aksi-aksi provokasi bahkan agresi kerap terjadi diantara kedua negara. Dalam upaya peningkatan kualitas hubungan antar kedua Korea, pemerintahan Korea Selatan telah merancang sejumlah tujuan dan rencana dalam kebijakannya terhadap Korea Utara, mencegah aksi provokatif atau perilaku yang tidak diinginkan. Korea Selatan memperkenalkan *Vision 3000* atau *Vision 300 thru Denuclearization and Openess Plan* yang merupakan kebijakan operasional dari kebijakan Korea Selatan yaitu *Mutual Benefit and Common Prosperity Policy*.

1. Kebijakan Mutual Benefit and Common Prosperity

Berdasarkan fakta bahwa Korea Utara takut Korea Selatan akan berusaha untuk menyatukan Semenanjung Korea dengan memikat Utara yang sedang di landa krisis. Pada saat ini belum melihat banyak perkembangan positif dalam hubungan antar-Korea. akibatnya, Korea Utara berniat untuk mengatur laju pembangunan antara Utara dan Selatan. Fitnah Selatan oleh Korea Utara baru –baru ini dimaksudkan untuk bertindak sebagai penentu kecepatan bagi hubungan antar-Korea. kecemasan apapun terkait penyerapan atau runtuhnya rezim di pihak Pyongyang harus dikurangi agar ada perkembangan dalam hubungan antar –Korea.

Kebijakan pemerintah Lee Myung-bak terhadap Korea Utara disebut “ *mutual benefits and common prosperity.*” Dengan “ *Mutual Benefits and Common Prosperity*, pemerintah memiliki dua hal dalam kebijakan ini. Yang pertama, adalah menghilangkan kekhawatiran yang mungkin dimiliki Korea Utara mengenai *Unification by absorption* sembari mencari jalan menuju reunifikasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan mendukung pembicaraan Denuklirisasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat, dimana Korea Selatan dapat membantu kedua negara membangun hubungan diplomatic yang akan membantu mengurangi masalah keuangan dan keamanan yang dihadapi Korea Utara. Yang kedua adalah, dengan membantu Korea Utara dalam pengembangan ekonominya, maka Korea Selatan dapat membawa perkembangan ekonominya ke level yang baru (Kim T. , 2013).

Kebijakan *Mutual Benefit and Common Prosperity* pertama kali disampaikan dalam pidato Presiden Lee pada Opening of the National Assembly: “*Our priority in our North Korea policy is denuclearization and finding a way for both the North and South to mutual benefits and common prosperity.*” Dimana adanya suatu prioritas dalam kebijakan terhadap Korea Utara ialah denuklirisasi dan menemukan cara bagi Korea Utara dan Korea Selatan untuk saling menguntungkan dan adanya kesejahteraan bersama. Perkembangan antara Korea Utara dan Selatan melalui kebijakan *mutual benefit and common prosperity* akan meningkatkan perdamaian di dalam Semenanjung Korea dan menyediakan dasar untuk proses penyatuan yang damai. Juga visi 3000 melalui Denuclearization dan keterbukaan rencana yang diterapkan dengan tiga langkah politik utama yang diperlukan untuk memajukan perkembangan yang saling menguntungkan dan kesejahteraan bersama bagi kedua Korea. (Jean S. J., 2009)

Selain itu dari bidang ekonomi diharapkan kebijakan ini mampu membantu perekonomian Korea Utara yang sedang dalam masalah keuangan sembari mengejar kepentingan kemanusiaan melalui tiga hal utama yang disebut sebagai alat untuk menjamin keberhasilan dari tujuan kebijakan ini yaitu *Vision 3000 thru Denuclearization and Openness Plan*. Rencana ini memiliki tiga misi utama yaitu :

a. *Vision 3000* :

Untuk mewujudkan kebijakan ini, rencana Vision 3000 berupaya untuk mempengaruhi ekonomi pembangunan Korea Utara. Jika masalah nuklir Korea Utara dipecahkan dan system politik dibuka, ekonomi Korea Utara akan mengalami peningkatan yang mencolok. Investasi asing akan dilakukan dan bisnis

antar-Korea akan dihasilkan. Tujuan jangka panjang dari *mutual benefit and common prosperity* adalah untuk mewujudkan Persemakmuran ekonomi di Semenanjung Korea. Jika rencana visi 3000 dilakukan, peningkatan hubungan Inter-Korea akan melampaui, menciptakan peluang untuk meningkatkan perekonomian Korea secara keseluruhan. Korea Selatan menyadari bahwa pokok masalah yang selama ini menghambat kemajuan dari proses reunifikasi adalah keadaan ekonomi Korea Utara yang sedang dalam krisis.

Ide dari Visi 3000 ini ditujukan untuk mengatasi isu nuklir Korea Utara yang selama ini merupakan batu penghalang bagi kemajuan dan perkembangan hubungan antar kedua Korea. Dalam rangka menyelesaikan hal ini maka Korea Selatan berusaha untuk membantu Korea Utara dalam meningkatkan perkembangan ekonominya yaitu dengan cara mengakomodasi hubungan Korea Utara dengan negara-negara anggota *Six Talks Party* seperti Amerika Serikat dan Jepang. Rencana ini sendiri meliputi beberapa program diantaranya menstimulasi Korea Utara agar mengadaptasikan kapitalisme meski tidak secara penuh dan mengikuti jejak dari para pendahulunya yang sama-sama dari blok sosialis seperti Cina, Vietnam, Rusia, dan beberapa negara di Eropa Timur yang telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pada akhirnya diharapkan melalui rencana ini Korea Utara dan Korea Selatan dapat sama-sama menciptakan kesejahteraan ekonomi bersama di semenanjung Korea dan membantu Korea Utara untuk mencapai pendapatan US\$3000 per kapita. Rencana ini sendiri secara politik juga mendukung usaha denuklirisasi karena menstimulasi Korea Utara untuk aktif dalam Six Part Talks dan mendorong Korea Utara untuk lebih terbuka.

Vision 3000 melalui denuklirisasi dan rencana keterbukaan (Openess Plan) berusaha untuk mewujudkan tingkat pembangunan ekonomi di Korea Utara dengan GNP perkapita 3000 dollar. Angka 3000 diyakini bahwa harus cukup untuk Korea Utara untuk menjalankan ekonomi independen dan untuk kelas menengah yang muncul dalam masyarakatnya.

Angka 3000 mengacu pada perekonomian Korea Utara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sama dengan dimana GNP negara akan naik ke 3000 dollar. Untuk mencapai tingkat GNP ini korea Utara harus bekerjasama dengan masyarakat internasional untuk memulihara barang ekspor perusahaan Korea Utara , pengembangan sumber data manusia untuk industry, membentuk dana untuk kerjasama internasional, menyediakan dukungan rekonstruksi ekonomi membangun jalan raya penghubung dan mendukung kesejahteraan rakyatnya. (jean, 2009)

b. Denuklirisasi

Inti dari rencana ini adalah menghentikan program nuklir Korea Utara. Hal ini masuk dalam rencana karena denuklirisasi berkaitan dengan hubungan inter-korea yaitu dalam hal penjaminan keamanan di semenanjung Korea. Korea Selatan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mengakomodasi dan menstimulasi Korea Utara dalam Six Party Talks agar tercipta hasil yang mulus dan sesuai dengan hasil perundingan. Bagi pemerintahan Lee Myung Bak denuklirisasi memiliki arti dalam yaitu menjaga hasil *Six Party Talks* tanpa adanya penyimpangan. Perbedaan mencolok pemerintahan Lee Myung-Bak dari pemerintahan sebelumnya adalah denuklirisasi yang sebelumnya dipandang sebagai sebuah ultimatum sekarang lebih dilihat sebagai bagian dari proses untuk

memulai suatu reunifikasi karena denuklirisasi adalah sebuah hal mutlak sebelum reunifikasi dapat dijalankan sekali lagi alasannya adalah untuk menjamin keamanan di semenanjung Korea.

c. *Opening and Modernization*

Pada abad ke-21, pembukaan negara sosialis yang berarti telah memasuki pasar dunia kapitalis. Untuk masuk ke pasar tersebut kedua negara harus menjalin hubungan diplomatik. Rencana opening dan Modernisasi ini mendorong Korea Utara untuk lebih membuka diri ke dunia internasional. Dalam mencapai hal tersebut perlu beberapa usaha dari Korea Utara mengingat mereka adalah negara yang berbasis komunis sosialis yang belum tentu semua negara bisa menerimanya. Satu-satunya cara Korea Utara harus menyesuaikan kondisinya baik itu dengan mengganti system pasar yang ada dengan pasar sosialis ataupun mengganti system ekonominya dengan membutuhkan sedikit kapitalisme. Korea utara tidak hanya fokus dalam masalah nuklir, tetapi juga menyelesaikan masalah penculikan, isu proliferasi senjata pemusnahan massal (WMD). (Jean J. S., 2009)

